



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kunci penting dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Pengertian pendidikan sendiri ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU SISDIKNAS No.12 tahun 2012).

Dalam hal ini Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No.20 Tahun 2003, Bab II Pasal 3). Oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan (UUD 1945, Pasal 31 ayat 1) dan setiap warga Negara juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (UU RI No.20 Tahun 2003, Bab IV Pasal 5). Hal ini menunjukkan suatu satuan pendidikan yang diselenggarakan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras dan kedudukan sosial serta tingkat kemampuan ekonomi, dan tidak terkecuali juga kepada para penyandang cacat. Khusus bagi para penyandang cacat disebutkan bahwa warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus yang dimaksud adalah pendidikan luar biasa (UU RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2).

Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik ataupun kelainan mental (PP RI No.72 tahun 1991, pasal 1 ayat 1). Kelompok inilah yang disebut dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Berdasarkan hasil analisa BPS dan Depsos tahun 2003 yang diakses melalui <http://brownmeandyellow.wordpress.com/2013/10/07/prestasi-belajar-dan-resiliensi/>, jumlah penyandang cacat di Indonesia sekitar 1,48 juta atau 0,7% dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penyandang cacat umur 5-18 tahun (masuk kategori usia sekolah) diprediksi 21,42 persen dari seluruh penyandang cacat, atau 317.016 anak. Sementara itu, berdasar data dari Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa), ABK yang sudah mendapat layanan pendidikan sebanyak 66.610 anak. Rinciannya, TKLB 8.011 anak, SDLB 44.849 anak, SMPLB 9.395 anak dan SMALB sebesar 4.395 anak. Baru 21 persen anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang telah memperoleh layanan pendidikan. WHO melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menghitung jumlah anak penyandang cacat atau ABK yang ada di Indonesia diketahui sekitar 7% dari total jumlah semua anak. Di tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 3% sehingga menjadi 10% dari jumlah anak di Indonesia.

Menurut PP no.17 tahun 2010 pasal 133 ayat (4), ditetapkan bahwa Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan. Integrasi antar jenjang dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) satu atap, yakni satu lembaga penyelenggara mengelola



jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dengan seorang Kepala Sekolah. Sedangkan Integrasi antar jenis kelainan, maka dalam satu jenjang pendidikan khusus diselenggarakan layanan pendidikan bagi beberapa jenis ketunaan. Bentuknya terdiri dari TKLB; SDLB, SMPLB, dan SMALB masing-masing sebagai satuan pendidikan yang berdiri sendiri masing-masing dengan seorang kepala sekolah.

Kota Cilegon merupakan wilayah bekas Kewadanaan (Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang dalam perkembangannya kota Cilegon telah memperlihatkan kemajuannya yang pesat di berbagai bidang baik bidang fisik, sosial, ekonomi maupun pendidikan (Biro Pemerintahan Provinsi Banten). Dalam bidang pendidikan luar biasa, tercatat sejak tahun 2010 hingga 2014 kota cilegon memiliki 3 SLB, dengan jumlah siswa penyandang cacat pada tahun 2010-2011 sejumlah 173 anak, tahun 2011-2012 sejumlah 196 anak, dan tahun 2012-2013 sejumlah 201 anak (Dinas Pendidikan Kota Cilegon). Dari jumlah siswa penyandang cacat tersebut, berdasarkan hasil survey diketahui jumlah penderita tuna grahita (baik ringan ataupun sedang) lebih besar dibanding dengan ketunaan lainnya.

Sekolah Luar Biasa di Kota Cilegon yang tersebar di kecamatan berbeda hingga saat ini mengalami peningkatan jumlah siswa, dan akan diperkirakan hal ini akan berlanjut hingga beberapa tahun kedepan. Untuk dapat menampung jumlah yang terus meningkat tersebut dan agar dapat mencapai tujuan pendidikan itu sendiri perlu adanya peningkatan fasilitas baik itu berupa pengembangan sekolah maupun penambahan sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar, latihan dan kegiatan lainnya. Akan tetapi melihat kondisi SLB di kota cilegon saat ini, sulit untuk bisa dikembangkan, dikarenakan lahan yang tersedia cukup kecil. Disamping itu lokasi beberapa sekolah yang sulit dijangkau dikarenakan letaknya jauh dari jalan umum, menyebabkan ada sebagian peserta didik yang berhenti bersekolah karena masalah transportasi.

Dalam standar sarana prasarana bangunan pendidikan, gedung sekolah merupakan hal yang sangat menentukan dan berpengaruh dalam proses pendidikan, termasuk untuk sekolah luar biasa bagi anak tunagrahita. Pada keadaan di lapangan, dapat diketahui SLB yang terdapat di kota cilegon masih belum dapat memenuhi kebutuhan secara khusus sesuai dengan keadaan masing-masing peserta didik. Banyak kelas-kelas yang disekat dan digunakan tanpa memisahkan jenis ketunannya. Selain itu bangunan yang ada saat ini belum dirancang sesuai dengan standar aksesibilitas untuk penyandang cacat sehingga menyulitkan bagi peserta didik maupun guru pengajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 yaitu :

1. KEMUDAHAN, semua orang dapat mencapai semua tempat
2. KEGUNAAN, setiap orang dapat mempergunakan semua tempat
3. KESELAMATAN, setiap bangunan dan lingkungan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang
4. KEMANDIRIAN, setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat tanpa bantuan orang lain.

Peraturan Menteri diatas dapat memberikan acuan pada kegiatan pembangunan. Dan dengan pendekatan Universal Design, kebutuhan seluruh penyandang cacat dalam hal ini peserta didik SLB Tuna Grahita, serta guru pengajar dapat terpenuhi dan dapat mewadahi kegiatan dan penunjang pembelajaran. Diharapkan dengan adanya SLB Tuna Grahita yang baru ini, dapat menjadi wadah bagi anak tunagrahita untuk mendapatkan



pendidikan yang layak dan berkualitas, guna menunjang bakat dan prestasi siswa tunagrahita.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan bangunan SLB Tunagrahita Kota Cilegon yang mampu memfasilitasi para peserta didik berkebutuhan khusus yang sesuai dengan standar fasilitas penyandang cacat dengan penekanan Universal Design.

1.2.2 Sasaran

Terwujudnya suatu langkah dalam pembuatan sebuah bangunan SLB Tunagrahita di Kota Cilegon berdasarkan atas aspek-aspek panduan perencanaan dan perancangan bangunan.

1.3 Manfaat

1.3.1 Subyektif

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk menyusun landasan perencanaan dan perancangan arsitektur dalam pembuatan Tugas Akhir.

1.3.2 Obyektif

Sebagai panduan dan acuan selanjutnya dalam perancangan SLB Tunagrahita Kota Cilegon, selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Lingkup pembahasan menitik-beratkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan pendidikan bagi para penyandang cacat tunagrahita secara menyeluruh dan berkelanjutan yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana penunjang aktivitas pendidikan dan pengembangan keterampilan dengan pendekatan aksesibilitas, dalam wadah yang dikenal dengan Sekolah Luar Biasa Tunagrahita di Kota Cilegon.

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Perencanaan dan perancangan Sekolah Luar Biasa Tunagrahita di Kota Cilegon, yang berada di Provinsi Banten.

1.5 Metode Pembahasan

1.5.1 Metode Deskriptif

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menguraikan dan menjelaskan data kualitatif dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta *browsing* internet.



1.5.2 Metode Dokumentatif

Yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto yang di hasilkan.

1.5.3 Metode Komparatif

Yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan Sekolah Luar Biasa di suatu kota yang sudah ada.

Dari data-data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur bangunan gedung Sekolah Luar Biasa Tunagrahita Kota Cilegon.

1.6 Sistematika Pembahasan

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul Sekolah Luar Biasa Tunagrahita Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan sistematika bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum mengenai sekolah luar biasa, tinjauan Standar pelayanan minimal penyelenggara sekolah luar biasa, tinjauan tunagrahita, tinjauan klasifikasi tunagrahita, tinjauan penekanan desain *Universal Design*, serta tinjauan studi banding dan kesimpulan studi banding.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA KOTA CILEGON

Membahas tentang tinjauan Kota Cilegon berupa data-data fisik dan non-fisik seperti letak geografis, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata ruang wilayah di Kota Cilegon. Selain itu terdapat juga pembahasan mengenai tinjauan Sekolah Luar Biasa di Cilegon.

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN TANGGAPAN

Berisi kesimpulan, batasan dan tanggapan dari beberapa bab sebelumnya.

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SLB TUNAGRAHITA KOTA CILEGON

Berisi tentang kajian/ analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual, dan aspek visual arsitektural.



BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SLB TUNA GRAHITA KOTA CILEGON

Merupakan hasil akhir pembahasan LP3A, sekaligus menjadi acuan untuk perancangan arsitektur pada tahap berikutnya. Berisi program ruang dan kebutuhan luas tapak untuk SLB Tuna Grahita Kota Cilegon.



1.7 Alur Pikir

